

Judul : Kementerian/Lembaga Ramai-ramai Usulkan Tambahan Anggaran
Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RAPBN 2027

Kementerian/Lembaga Ramai-ramai Usulkan Tambahan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kementerian dan lembaga mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 karena pagu yang ditetapkan dinilai belum mencukupi kebutuhan. Pada saat yang sama, sejumlah lembaga pengawas mengeluhkan keterbatasan anggaran telah menghambat pelaksanaan tugas. Karena itu, tambahan anggaran perlu diberikan secara selektif dengan tetap mengedepankan efisiensi.

Pekan ini, semua komisi di DPR tengah membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027 bersama dengan mitra kerja masing-masing. Setiap hari, sejak 31 Agustus hingga Rabu (2/9/2026), gedung DPR dipenuhi rapat kerja komisi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Dalam rapat-rapat itu, hampir semua kementerian/lembaga mengusulkan tambahan anggaran. Alasannya, pagu yang diterima belum cukup untuk membiayai program dan pelaksanaan tugas masing-masing.

Kejaksaa Agung, misalnya, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,1 triliun dan telah disetujui Komisi III DPR. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk tun-

jangan pegawai dan renovasi kantor. Pagu anggaran 2027 sebesar Rp 21,5 triliun dinilai belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan.

Kementerian Sekretariat Negara juga mengajukan tambahan anggaran Rp 6,6 triliun untuk mengoptimalkan pelayanan teknis dan administratif bagi presiden dan wakil presiden. Jumlah tersebut sekitar Rp 4 triliun lebih besar dari pagu yang ditetapkan. Komisi XIII DPR juga menyetujui usulan tersebut.

Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi Rp 189 triliun untuk 2027 atau meningkat sekitar Rp 50 triliun dari pagu setelah usulan tambahan anggarannya disetujui Komisi III DPR. Anggaran tersebut diklaim akan digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas pertahanan negara.

Ada pula usulan tambahan anggaran untuk memperkuat fungsi pengawasan dan menjalankan tugas-tugas prioritas, khususnya pada lembaga-lembaga pengawas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, mengusulkan tambahan sekitar Rp 99 miliar. Alasannya, pagu indikator Rp 94,2 miliar belum cu-

Anggaran kementerian/ lembaga memang hampir pasti akan dikorbankan.

Lucius Karus

kup untuk membiayai kerja-kerja pengawasan, termasuk penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Begitu juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan tambahan anggaran Rp 774,31 miliar dan telah disetujui Komisi III DPR. Usulan itu diajukan karena pagu sekitar Rp 1,45 triliun yang ditetapkan untuk KPK pada 2027 dinilai belum mencukupi.

Meski seluruh usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga tersebut telah disetujui komisi terkait, realisasinya masih bergantung pada hasil pembahasan antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR.

Menanggapi usulan tambahan anggaran tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhyidin Mohamad Said mengatakan, pihaknya masih menanti laporan dari tiap-tiap komisi. Laporan itu akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran sehingga belum ada keputusan.

Dikorbankan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, di tengah kondisi APBN yang tertekan sekarang ini, penambahan anggaran kementerian/lembaga merupakan hal yang berat. Apalagi jika program yang diajukan sebagai dasar permintaan penambahan anggaran bukan termasuk kebutuhan prioritas.

Pada saat yang sama, lanjut Lucius, pemerintah memiliki program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang memerlukan anggaran sangat besar. Pemerintah dipastikan tak ingin program prioritas itu terhambat karena persoalan anggaran.

"Karena itu, anggaran kementerian/lembaga memang hampir pasti akan 'dikorbankan'," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Lucius, kementerian/lembaga boleh saja mengajukan penambahan anggaran dalam Rancangan APBN 2027. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka harus siap jika nanti saat pembahasan di Badan Anggaran DPR, keinginan mereka bisa saja tak dipenuhi sehingga tetap sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan.

Alternatif lain, Lucius berpandangan, kementerian/lembaga bisa selektif merancang program yang sangat prioritas dengan modal anggaran sesuai dengan pagu yang ada. Penambahan anggaran untuk program yang sifatnya tidak sangat mendesak bisa diundur ke anggaran tahun selanjutnya.

Ia juga mengingatkan agar anggaran dihindarkan dari program-program yang dibuat untuk kepentingan politik, baik pemerintah maupun DPR. Program yang langsung untuk rakyat harus diprioritaskan.

DPR, lanjut Lucius, juga harus memberikan perhatian serius terhadap usulan tambahan anggaran dari lembaga-lembaga pengawas. Namun, lembaga-lembaga itu juga diharapkan bisa memahami semangat efisiensi pemerintah. (BOW)